

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Proyek DKI Baru Terserap 38 Persen

Program strategis seperti penanggulangan banjir berpotensi terhambat.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Serapan anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kemarin baru mencapai 38 persen atau setara dengan Rp 17,6 triliun. Sejumlah organisasi perangkat daerah tidak mencapai target serapan yang mereka tetapkan.

Situs publik.bapedadki.net, misalnya, menyebutkan serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta hingga kemarin baru 13,01 persen atau setara dengan Rp 320,5 miliar dari alokasi anggaran Rp 2,4 triliun.

Dari pagu anggaran Rp 2,4 triliun itu, sebesar Rp 932,57 miliar awalnya dialokasikan untuk membangun tujuh rumah susun, merevitalisasi dua rumah susun, serta membangun sarana dan prasarana di rumah susun. Belakangan, pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2019, Dinas Perumahan mengusulkan pemangkasan dana pembangunan dan revitalisasi rumah susun sewa sebesar Rp 332,6 miliar atau menjadi Rp 599,9 miliar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan serapan anggaran di instansinya masih rendah karena banyaknya

program pembangunan fisik. "Program fisiknya dominan," kata dia di Balai Kota, kemarin.

Kelik menuturkan rendahnya serapan anggaran antara lain akibat lamanya proses lelang. Sebelumnya, Dinas Perumahan menargetkan penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang proyek rumah susun pada pertengahan tahun ini. Ternyata target itu tak tercapai. "Ini masih dalam proses lelang," ujarnya.

Meski serapan anggaran Dinas Perumahan baru 13,01 persen, Kelik mengklaim kegiatan strategis daerah, seperti pembangunan rumah susun sewa, tidak akan terganggu. Sebab, proyek itu dikerjakan dengan skema *multiyear* atau tahun jamak. "Jadi masih masuk dalam koridor-lah," ucapnya.

Organisasi perangkat daerah lain yang serapan anggarannya masih rendah ialah Dinas Sumber Daya Air (SDA). Hingga kemarin, serapan anggaran Dinas SDA baru mencapai 21,35 persen atau setara dengan Rp 826,3 miliar.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini, menjelaskan bahwa serapan anggaran dinasnya rendah lantaran kontrak proyek dengan pemenang lelang rata-rata baru ditekan pada Juni-Juli. "Jadi, itu agak terlambat," tuturnya.

Juaini menargetkan penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang

berlangsung pekan ini, termasuk untuk proyek kegiatan strategis daerah. Proyek strategis itu antara lain pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk, situ, dan embung, serta revitalisasi sistem polder dan tanggul pantai.

Juaini optimistis serapan anggaran Dinas SDA akan meningkat pada Oktober dan November mendatang. Sebab, pada bulan itu, para kontraktor proyek akan mulai menagih pembayaran atas pekerjaan mereka. "Oktober-November sudah mulai kelihatan-lah kenaikan serapan anggarannya," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak serapan anggaran pemerintah DKI Jakarta disebut rendah. Dia mengklaim realisasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah masih sesuai dengan serapan perkiraan sendiri.

Menurut Anies, serapan anggaran seharusnya diukur berdasarkan kesesuaian antara realisasi serapan anggaran dan perkiraan sendiri setiap instansi. "Kalau dibandingkan dengan proyeksinya, kami masih sama dengan rencananya," kata dia.

Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, meminta pemerintah DKI memperbaiki serapan anggarannya. Menurut dia, rendahnya serapan anggaran berpotensi membuat

kegiatan strategis daerah terganggu.

Contohnya, Pantas melanjutkan, jika pengadaan lahan untuk program naturalisasi sungai tidak terserap optimal, kegiatan strategis itu bakal terganggu. "Program antisipasi banjir juga bisa enggak tercapai," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

● IMAM HAMDI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Proyek DKI Baru Terserap 38 Persen

Ponten Merah Serapan Anggaran

SEJUMLAH satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat ponten merah karena serapan anggarannya tidak mencapai target yang ditetapkan (serapan perkiraan sendiri). Padahal, menurut ketua sementara DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, salah satu tolok ukur kinerja SKPD adalah serapan anggaran. "Kekhawatiran kami, rendahnya serapan anggaran bisa membuat kegiatan strategis daerah terhambat," kata Pantas, kemarin. Berikut ini catatan serapan anggaran Jakarta hingga kemarin.

Total Serapan Anggaran

Kategori	Alokasi Anggaran	Penyerapan	Persentase
Belanja langsung	Rp 46,3 triliun	Rp 17,6 triliun	38,01
Belanja tidak langsung	Rp 34,5 triliun	Rp 19,1 triliun	55,57

SUMBER: PUBLIK.BAPEDADKI.NET

Serapan di Tingkat Instansi (Sampel)

Instansi	Alokasi Anggaran	Target Serapan (persen)	Realisasi Serapan (persen)
Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 1,51 triliun	46,13	27,29
Dinas Lingkungan Hidup	Rp 3,7 triliun	55,84	32,2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 2,46 triliun	31,1	13,01
Dinas Sumber Daya Air	Rp 3,86 triliun	37,84	21,35
Dinas Bina Marga	Rp 3,8 triliun	17,61	20,04
Dinas Kesehatan	Rp 6,6 triliun	59,71	59,09
Dinas Pendidikan	Rp 16,36 triliun	50,51	51,2

● GANGSAR PARIKESIT